



Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

I Putu Krisna Tama Frandika¹, I Made Wianto Putra², Ni Nengah Seri Ekayani³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa
krisnatamafrandika21@gmail.com

How to cite (in APA style):

Frandika, I. P. K. T., Putra, I. M. W., & Ekayani, N. N. S. (2026). Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 7(1), 24-34.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran sistem pengendalian intern dalam memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 80 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Lestari & Dewi, 2020). Transparansi dan akuntabilitas merupakan kedua kriteria yang sangat penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah dengan membuat laporan pertanggungjawaban

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan kepada publik yang disajikan dalam format laporan keuangan (Ramadhan & Nurabiah, 2024). Salah satu bentuk keberhasilan pemerintah adalah dihasilkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas (Andriansyah *et al.*, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang meliputi laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan. Entitas pelaporan merupakan bagian pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban, berbentuk laporan keuangan (Rahayu & Kanita, 2023). Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas (Mahartini *et al.*, 2021). Terdapat empat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Sari, 2022).

Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya pengambilan keputusan suatu pemerintahan untuk masa yang akan datang (Muliani *et al.*, 2023). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, oleh karena itu pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Yanti *et al.*, 2022).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah (Ayem & Amahala, 2023). BPK dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah, yaitu: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini yang diberikan ketika hasil pemeriksaannya sudah tidak ada kesalahan atau kekeliruan yang dianggap material; (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu opini yang diberikan ketika hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan atau kekeliruan, tetapi tidak mempengaruhi kewajaran; (3) Tidak Wajar (TW) merupakan opini yang diberikan ketika hasil pemeriksaannya terbukti memuat banyak kesalahan dan kekeliruan yang bernilai material; dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP) merupakan opini yang diberikan karena pemeriksa tidak dapat meyakini laporan keuangan tersebut benar atau salah dengan alasan kurangnya bukti pada saat pemeriksaan laporan keuangan (Rahayu & Kanita, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan adalah persyaratan yang berkekuatan hukum dituangkan dalam peraturan pemerintah berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Arza *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Dewi (2020), Asri & Jaeni (2023), dan Mahmud & Lukum (2023) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun temuan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Trisnawati (2021), Mahartini *et al.*, (2021), dan Angelita & Saifhul (2022) yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

aplikasi komputer (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sebuah penerapan sistem mulai dari tahap pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan (Angelita & Saifhul, 2022). Sistem akuntansi menjadi sangat penting karena dapat membantu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi keuangan yang memadai dapat mempermudah pemerintah dalam menyusun laporan keuangan (Nugroho & Robiyanto, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2022) dan Machmudiyanti & Aufa (2023) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun temuan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mispa & Nurmala (2022) dan Purba *et al.*, (2024) yang menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap tingkat kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern adalah cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan pecegahan yang mendeteksi adanya kecurangan (Muliani *et al.*, 2023).

Penerapan sistem pengendalian intern dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, diharapkan dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dari penerapan standar akuntansi pemerintah sehingga akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian intern mengupayakan adanya jaminan ditaatinya peraturan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku (Angelita & Saifhul, 2022). Penerapan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diharapkan mendukung efisiensi dan efektivitas implementasi standar akuntansi untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas (Asri & Jaeni, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Angelita & Saifhul (2022) dan Asri & Jaeni (2023) menemukan bahwa sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun temuan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Kapriana & Agung (2020), Jauhari *et al.*, (2021), Mahmud & Lukum (2023) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern akan berjalan dengan baik apabila di dukung dengan penerapan sistem akuntansi yang berjalan secara efektif. Dengan mengoptimalkan sistem pengendalian diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat menjadi mediator dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan dalam sistem pengendalian intern diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Nugroho & Robiyanto, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Kapriana & Agung (2020), Angelita & Saifhul (2022), dan Nugroho & Robiyanto (2023) menemukan bahwa sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun temuan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauhari *et al.*, (2021) dan Amabarawati (2022) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi penerapan sistem akuntansi

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari studi yang disebutkan di atas, penulis mencoba meneliti apakah faktor-faktor yang dijelaskan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, sehingga penulis mengambil judul “Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

METODE PENELITIAN

Tempat dan lokasi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui beberapa instansi dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Objek penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang membidangi keuangan dan fungsi akuntansi pada Organisasi perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tabanan. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel atas responden menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan dengan kriteria tersebut maka dari setiap bagian keuangan dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tabanan diambil 4 orang sebagai anggota sampel yang meliputi kepala instansi, sekretaris, kepala sub bagian keuangan, dan 1 orang staf sub bagian keuangan yang memiliki masa kerja paling lama. Data kuantitatif dalam penelitian ini didapat dari jumlah nilai yang dihasilkan dari kuesioner yang disebar dan telah dijawab oleh responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tabanan. Data primer dari riset ini ialah hasil kuesioner para responden dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tabanan. Analisa *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan teknik analisa data yang dipergunakan mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator.

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Hasil Karakteristik Responden

Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jabatan	Kepala Instansi	20	25,0
	Sekretaris	20	25,0
	Kasubag Keuangan	20	25,0
	Staf Subag Keuangan	20	25,0
Jumlah		80	100
Jenis Kelamin	Laki-Laki	44	55,0
	Perempuan	36	45,0
Jumlah		80	100
Usia	21-30 Tahun	3	3,7
	31-40 Tahun	11	13,8
	41-50 Tahun	31	38,7
	51-60 Tahun	35	43,8
Jumlah		80	100
Pendidikan Terakhir	Diploma	3	3,7
	S1	42	52,5
	S2	33	41,3
	S3	2	2,5
Jumlah		80	100
Kelas Kerja	1-10% Tahun	3	3,7
	11-20 Tahun	31	38,8
	21-30 Tahun	34	42,5
	31-40 Tahun	12	15,0
Jumlah		80	100

Sumber: Data diolah primer (2025)

- 1) Berdasarkan jabatan, dapat diketahui responden yang menjabat sebagai kepala instansi sebanyak 20 orang (25%), responden menjabat sebagai sekretaris sebanyak 20 orang (25%), responden menjabat sebagai kasubag keuangan sebanyak 20 orang (25%) dan responden menjabat sebagai staf subag keuangan sebanyak 20 orang (25%). Sehingga dapat diketahui bahwa responden memiliki proposi yang sama pada jabatan yang ada.
- 2) Berdasarkan jenis kelamin responden, dapat diketahui responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang (55%), responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (45%). Sehingga dapat diketahui bahwa responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi pada penelitian ini.
- 3) Berdasarkan usia responden, dapat diketahui responden dengan usia 21-30 tahun sebanyak 3 orang (3,7%), responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 11 orang (13,8%), responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 31 orang (38,7%) dan responden dengan usia 51-60 tahun sebanyak 35 orang (43,8%). Sehingga dapat diketahui bahwa responden dengan usia 51-60 tahun lebih mendominasi pada penelitian ini.
- 4) Berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir, dapat diketahui responden dengan pendidikan terakhir Diploma sebanyak 3 orang (3,7%), responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 42 orang (52,5%), responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 33 orang (41,3%) dan responden dengan pendidikan terakhir S3 sebanyak 2 orang (2,5%). Sehingga dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir S1 lebih mendominasi pada penelitian ini.

- 5) Berdasarkan karakteristik masa kerja, dapat diketahui responden yang bekerja selama 1-10 tahun sebanyak 3 orang (3,7%), responden yang bekerja selama 11-20 tahun sebanyak 31 orang (38,8%), responden yang bekerja selama 21-30 tahun sebanyak 34 orang (42,5%) dan responden yang bekerja selama 31-40 tahun sebanyak 12 orang (15%). Sehingga dapat diketahui bahwa responden yang bekerja selama 21-30 tahun lebih mendominasi pada penelitian ini.

Pengujian validitas menghasilkan jika seluruh instrumen variabel penelitian telah memenuhi syarat uji validitas yang dimana nilai skor total *Pearson Correlation* masing-masing instrumen berada diatas 0,30 dan memiliki nilai r hitung $\geq r$ tabel, maka instrumen layak digunakan menjadi alat ukur variabel-variabel tersebut. Pengujian reliabilitas pada masing-masing variabel berada pada titik diatas 0,60 yang ditunjukkan pada hasil *Cronbach's Alpha*, maka dapat dikatakan seluruh instrumen telah memenuhi syarat reliabilitas.

Tabel 2.
Hasil Pengujian Normalitas

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.22657212
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.065
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2 tailed)		.098^c

Sumber: Data diolah primer (2025)

Selanjutnya uji normalitas disajikan diatas besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,091 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal. Dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3.
Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.121	10.376		1.168	.246
	X1	.082	.187	.267	.437	.663
	X2	-.401	.304	-.798	-1.321	.191
	Z	-.326	.300	-.859	-1.088	.280
	X1Z	-.002	.006	-.285	-.316	.753
	X2Z	.013	.009	1.346	1.493	.140

Sumber: Data diolah primer (2025)

Pengujian heteroskedastisitas jika masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu absolute error, maka dari itu, penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.

Hasil Pengujian Regresi

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5166.238	5	1033.248	54.179	.000 ^b
	Residual	1411.249	74	19.071		
	Total	6577.488	79			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-21.775	14.363		-1.523	.133
	X1	.828	.204	.681	4.054	.000
	X2	1.282	.200	.881	6.402	.000
	X3	.881	.200	.727	4.402	.000
	X4	-.180	.200	-.152	-.914	.357
	X5	1.129	.204	.920	5.532	.000

Sumber: Data diolah (2025)

Pembahasan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,893 dan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hasil ini berarti bahwa semakin meningkat penerapan standar akuntansi pemerintah, maka akan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Hal ini sejalan dengan temuan hasil rata-rata tertinggi pada indikator pernyataan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, yaitu "Laporan keuangan disusun/disajikan terdapat catatan atas laporan keuangan pada setiap periode dan memberikan informasi yang lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan" yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,06 dan termasuk dalam kriteria baik. Nilai ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, khususnya dalam penyajian catatan atas laporan keuangan yang lengkap dan informatif. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintah yang konsisten dan tepat berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada *stakeholders* (Mahartini *et al.*, 2021). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Ramayoni, 2021). Sejalan dengan teori *stewardship* yang mengarahkan perwujudan akuntabilitas oleh *steward* kepada masyarakat dapat dilakukan dengan pelaporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Penerapan standar akuntansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten sebagai upaya meningkatkan kualitas LKPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Dewi (2020), Asri & Jaeni (2023), dan Mahmud & Lukum (2023)

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1,462 dan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil ini berarti bahwa semakin meningkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Hal ini sejalan dengan temuan hasil rata-rata tertinggi pada indikator pernyataan variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, yaitu “Pada instansi tempat saya bekerja, pencatatan dilakukan secara urut/sesuai dengan kronologi” yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,83 dan termasuk dalam kriteria baik. Nilai ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan telah dilakukan secara sistematis dan kronologis, yang mencerminkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tertib dan teratur. Dengan demikian, semakin baik penerapan sistem ini, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2022) dan Machmudiyan & Aufa (2023) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,001 dan nilai signifikan sebesar $0,886 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern tidak berdampak pada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Hal ini sejalan dengan temuan hasil rata-rata terendah pada indikator pernyataan variabel sistem pengendalian intern yaitu, “Pada instansi tempat saya bekerja telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.” yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,28 dan termasuk dalam kriteria cukup baik. Nilai ini menunjukkan bahwa standar kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi belum sepenuhnya optimal, sehingga sistem pengendalian intern belum berperan secara maksimal. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern belum berperan secara maksimal dalam mempengaruhi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud & Lukum (2023) dan Amabarawati (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis keempat menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,045 dan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan sistem pengendalian intern mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis efek moderasi yang ditimbulkan sistem pengendalian intern adalah memperlemah hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Hasil ini membuktikan bahwa interaksi antara sistem pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menurunkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Hal ini sejalan dengan temuan hasil rata-rata tertinggi pada indikator pernyataan variabel sistem pengendalian intern yaitu, “Pada instansi tempat saya bekerja selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan dan saran yang diberikan oleh BPK” yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,50 dan termasuk dalam kriteria baik. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan berjalan efektif dalam menyediakan informasi yang tepat waktu serta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi, meskipun demikian hasil analisis menunjukkan bahwa efek moderasi dari sistem pengendalian intern justru memperlemah pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, interaksi antara sistem pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kapriana & Agung (2020), Angelita & Saifhul (2022), dan Nugroho & Robiyanto (2023) menemukan bahwa sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan efek moderasi yang dihasilkan adalah memperlemah hubungan.

Penelitian ini hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Sehingga kedepannya dapat dilakukan dari lingkup yang lebih luas lagi atau melakukan penelitian pada kabupaten lainnya. Variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan masih terbatas pada penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern. Sedangkan masih banyak lagi variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amabarawati, R. (2022). "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. 9, 356–363.
- Andriansyah, R. J., Sudaryanti, D., & ... (2022). ... Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Riset ...*, 11(04), 51–61.
- Angelita, S., & Saifhul, A. (2022). Determinan Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kota Banjarmasin dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. | *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1), 286–302.
- Asri, S. R., & Jaeni, J. (2023). Peran SPI sebagai Pemoderasi pada Pengaruh Teknologi Informasi dan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKAD Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 467. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.835>
- Ayem, S., & Amahala, R. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(01), 90–102. <http://m.rii.co.id/yogyakarta/politik/1031802/diy->
- Jauhari, H., & Hazisma, S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104–121.
- Kapriana, A. P., & Agung, I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Opd Dikabupaten Kuburaya). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(1), 47–70. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41143>
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1125–1134.
- Mahmud, A. A., & Lukum, A. (2023). Pengaruh Penerapan SAP dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan SPI Sebagai Variabel Moderating. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 282–296. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i2.95>
- Mispa, & Nurmala. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 256–266.

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
<https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3456>

- Muliani, M., Usman, A., Bensaadi, I., & Nurhasanah, N. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 168. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11224>
- Nugroho, D. H., & Robiyanto, F. (2023). Determinasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 3(1), 46–66.
- Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 423–432. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3093>
- Rahmawati, M., & Trisnawati, R. (2021). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 1(2), 39. <https://doi.org/10.30595/raar.v1i2.11909>
- Ramadhan, M. Z., & Nurabiah, N. (2024). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada OPD BPKAD Pemerintahan Kota Bima). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i1.4284>
- Ramadhan, R., & Fahrani, U. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 229–247. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3638>
- Ramayoni, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 2(1), 644–663.
- Sari, F. M. (2022). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 8(2), 101. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v8i2.6248>